

MICHAEL WALZER DAN “KESETARAAN YANG KOMPLEKS”

A. WIDYARSONO*

Abstract: Michael Walzer’s *Spheres of Justice* is not only a critique of Rawls’ *A Theory of Justice*, but also an ambitious response to it. Unlike other thinkers labeled as communitarians, Walzer is not merely keen to provide us with a critique of Rawls, but he also develops an alternative view of how society ought to be. Walzer is interested in the methodology of a political theory. More precisely, he focuses on a theory of goods upon which a theory of justice is based and how we relate that to the conduct through which we believe such goods should be distributed. On this ground, he criticizes Rawls’ theory of justice and develops a new account of justice, which he calls “a regime of complex equality.” The purpose of this article is to show the merits of Walzer’s account of “complex equality” over the two substantive principles of justice defended by Rawls.

Keywords: Complex equality, simple equality, domination, monopoly, theory of goods, distributive principles, pluralism, relativism, spheres of justice.

Abstrak: Karya Michael Walzer, *Spheres of Justice*, bukanlah hanya sebuah kritik atas karya Rawls, *A Theory of Justice*, melainkan juga merupakan suatu jawaban yang ambisius terhadapnya. Tidak seperti para pemikir komunitarian yang lain, Walzer tidak hanya berusaha menyediakan bagi kita suatu kritik atas Rawls, melainkan juga mengembangkan suatu pandangan alternatif mengenai bagaimana masyarakat seharusnya dikembangkan. Minat utama Walzer adalah dalam hal metodologi suatu teori politik. Lebih tepatnya, ia memusatkan perhatian pada suatu teori barang-barang yang seharusnya mendasari suatu teori keadilan dan bagaimana teori ini menentukan perilaku mengenai cara-cara barang-barang tersebut seharusnya didistribusikan. Dengan dasar inilah ia mem-

* A. Widyarsono, Program Studi Ilmu Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Cempaka Putih Indah 100A, Rawasari, Jakarta 10520. E-mail: awidya@gmail.com.

buat kritik yang tajam atas teori keadilan Rawls dan mengembangkan konsep keadilan baru yang ambisius, yakni suatu konsep yang disebutnya sebagai “kesetaraan yang kompleks.” Maksud dari artikel ini adalah untuk menunjukkan keunggulan teori “kesetaraan yang kompleks” ini atas dua prinsip keadilan yang dibela oleh Rawls.

Kata-kata Kunci: Kesetaraan yang kompleks, kesetaraan yang sederhana, dominasi, monopoli, teori barang-barang, prinsip-prinsip distribusi, pluralisme, relativisme, ruang-ruang keadilan.

PENDAHULUAN

Dalam karya utamanya, *Spheres of Justice*¹ (“Ruang-ruang Keadilan”), Michael Walzer menunjukkan suatu reaksi yang kritis dan ambisius terhadap proyek *A Theory of Justice* dari Rawls. Dalam bagian *Acknowledgement* buku yang diterbitkan pada 1983, Walzer mengatakan bahwa buku itu merupakan separuh dari hasil seminar yang diadakannya bersama Robert Nozick dengan tema “Capitalism and Socialism” di Universitas Harvard pada tahun akademik 1970-71.² Sebagai bagian kedua dari debat antara Walzer dan Nozick, SJ menghasilkan suatu teori keadilan sosial yang sangat berbeda dengan teori keadilan libertarian yang diuraikan oleh Nozick dalam karya utamanya, *Anarchy, State and Utopia* (1974).³ Kalau Nozick menganggap teori keadilan Rawls itu kurang liberal dalam kaca mata libertarianisme, Walzer menganggap teori keadilan Rawls kurang radikal sebagai suatu teori keadilan sosial.

Walzer biasanya dimasukkan dalam kategori pemikir aliran komuni-

1 Untuk selanjutnya disingkat SJ ketika digunakan dalam tubuh artikel.

2 Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality* (New York: Basic Books, 1983), p. xvii.

3 Libertarianisme adalah salah satu bentuk aliran sayap kanan liberalisme. R. Nozick adalah tokoh kontemporer dari aliran ini. Posisi Walzer tentu saja bertolak belakang dengan posisi Nozick, karena Walzer dianggap sebagai tokoh sayap kiri liberalisme. Kaum libertarian mati-matian membela kebebasan pasar dan menentang dengan keras sistem perpajakan yang oleh kebanyakan kaum liberal dianggap sebagai cara redistribusi kekayaan untuk menerapkan prinsip kesamaan dalam liberalisme. Kaum libertarian seperti Nozick menentang perpajakan redistributif, karena dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia atas kepemilikan. Nozick, misalnya mengembangkan “teori pemilikan hak” (*entitlement theory*) untuk menjelaskan alasan penolakan ini. Lih. Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy: An Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2002), pp. 102-159.

tarianisme.⁴ Kekhasan Walzer dibandingkan dengan para pemikir aliran komunitarianisme yang lain adalah bahwa ia tidak hanya membuat suatu kritik yang tajam melawan Rawls, tetapi ia juga ingin mengem-bangkan suatu pandangan alternatif mengenai bagaimana masyarakat seharusnya dikembangkan. Kritik Walzer terhadap Rawls berpusat pada metodologi yang digunakan Rawls. Sementara M. Sandel, misalnya, menyerang pandangan Rawls tentang manusia sebagai individu (*person*), sedangkan A. MacIntyre dan C. Taylor memberi kritik atas prinsip-prinsip liberal secara umum dengan mempresentasikan deskripsi historis kebudayaan Barat,⁵ Walzer lebih tertarik pada masalah metodologi teori politik, yakni "bagaimana seseorang seharusnya memulai usaha mem-bangun atau mempertahankan suatu teori keadilan."⁶ Lebih tepat lagi, ia memfokuskan diri pada pembahasan mengenai "suatu teori barang-barang" (*a theory of goods*)⁷ yang seharusnya mendasari suatu teori keadilan dan bagaimana teori ini menentukan perilaku mengenai cara-cara barang-barang tersebut seha-

4 Lih. Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy*, pp. 210-212.

5 Michael Sandel menciptakan sebutan "komunitarianisme" yang kemudian diikuti oleh yang lain. Bukunya, *Liberalism and the Limits of Justice* (1982), adalah buku yang mengawali kritik komunitarian atas liberalisme Rawlsian. Sandel menyatakan bahwa konsep Rawls mengenai individu adalah konsep individualisme yang a-sosial, dalam arti tidak memberi ruang bagi ide bahwa individu secara substantial terikat dengan komunitasnya. Sementara itu MacIntyre dan Taylor mengarahkan kritik mereka tidak terutama pada teori Rawls, melainkan pada perkembangan dan kemunduran kebudayaan moral dan politis Barat dan kemudian liberalisme Rawls dipahami sebagai salah satu bentuk kebudayaan modern yang paling sentral. Lih. Alasdair MacIntyre, *After Virtue* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981); *Whose Justice? Which Rationality?* (London: Duckworth, 1988); dan *Three Rival Versions of Moral Enquiry* (London: Duckworth, 1990); Charles Taylor, *Philosophical Papers. Volumes 1 & 2* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), dan *Sources of the Self* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

6 Stephen Mulhall and Adam Swift, *Liberal and Communitarians* (Oxford: Blackwell, 1992), p. 127.

7 Yang dimaksud dengan "goods" oleh Walzer di sini adalah barang-barang yang perlu didistribusikan secara adil dalam kehidupan sosial. Barang-barang itu adalah baik barang-barang yang secara sempit dipahami secara material seperti makanan, rumah, pakaian, transportasi, pelayanan kesehatan, berbagai macam barang komoditi, dan segala macam yang dikoleksi manusia (mis. lukisan, perangk, dll.), maupun barang-barang non-material seperti keanggotaan, kekuasaan, kehormatan, asal-usul keturunan, jabatan religius dan politis, pengetahuan, kemakmuran, cinta, dan rakhmat ilahi. Lih. Michael Walzer, *Spheres of Justice*, pp. 3, 11. Maka *a theory of goods* dalam tulisan ini diterjemahkan menjadi "suatu teori barang-barang." Namun kadang-kadang "goods" juga diterjemahkan barang-barang kebutuhan untuk menekankan bahwa barang-barang itu dibutuhkan manusia dalam kehidupan sosialnya.

rusnya didistribusikan. Dengan dasar inilah ia membuat kritik yang tajam atas teori keadilan Rawls dan mengembangkan konsep keadilan baru yang ambisius, yakni suatu konsep yang disebutnya sebagai “kesetaraan yang kompleks” (*complex equality*).⁸

Tulisan berikut ini berusaha memaparkan konsep Walzer mengenai “kesetaraan yang kompleks” dalam SJ. Konsep “kesetaraan yang kompleks” merupakan penulisan secara positif konsep keadilan Walzer setelah ia memberi kritik atas klaim universalitas dalam konsep keadilan Rawls. Dalam tulisan ini pertama-tama akan dibahas secara singkat mengenai Walzer dan karya-karyanya. Lalu akan diuraikan kritik utama Walzer atas klaim universalitas Rawls dalam teori keadilannya. Kemudian akan dikemukakan pokok-pokok pemikiran Walzer mengenai apa yang disebutnya sebagai “kesetaraan yang kompleks.” Selanjutnya akan dibahas beberapa catatan kritis terhadap teori keadilan Walzer tersebut, terutama dari kritik yang dikemukakan oleh Dworkin dan Cohen. Akhirnya tulisan ini akan ditutup dengan meringkas keunggulan teori keadilan Walzer dibandingkan dengan teori Rawls dan membahas secara singkat bagai-mana Walzer menanggapi para pengkritiknya dalam proyek-proyek selanjutnya.

MICHAEL WALZER DAN KARYA-KARYANYA

Michael Walzer dilahirkan pada 1935 di sebuah kota kecil yang memproduksi baja, Johnstown, Pennsylvania. Pada usia duabelas tahun ia sudah membuat sendiri pamflet mengenai pemogokan buruh dan kampanye politik. Sejak 1976 ia menjadi *co-editor* majalah kaum kiri Amerika Serikat yang terkemuka, *Dissent*, dan menjadi editor penyumbang *The New Republic* sejak 1977. Walzer mengawali studinya di Universitas Brandeis dan memperoleh gelar B.A. pada 1956. Ia melanjutkan studinya di Universitas Cambridge, Inggris, pada 1956-1957 dengan mendapatkan beasiswa dari “Fulbright Fellowship.” Ia memperoleh gelar Ph.D. dari Universitas Harvard pada 1961. Walzer adalah *Professor of Government* di Universitas Harvard pada 1966-1980 dan sebelumnya ia menjadi asisten profesor di Fakultas Politik di Universitas Princeton pada 1962-1966. Ia juga menjadi

8 Lih. Michael Walzer, *Spheres of Justice*, pp. 1-30.

seorang anggota Yayasan Universitas Hebrew di Yerusalem sejak 1974 dan anggota Yayasan Universitas Brandeis pada 1983-1988. Sejak 1980 ia menjadi Profesor di "School of Social Sciences" pada "Institute for Advanced Study," Princeton, New Jersey, dan sampai saat ini masih aktif memberi kuliah, walaupun sudah menjadi Profesor emeritus.

Walzer adalah seorang ahli teori politik Amerika Serikat yang terkemuka. Ia telah menulis banyak topik yang luas dalam teori politik dan filsafat moral, antara lain mengenai kewajiban politis, perang yang adil dan tidak adil, nasionalisme dan etnisitas, keadilan ekonomi, dan negara kesejahteraan. Ia dianggap memainkan peranan penting dalam menghidupkan kembali etika praktis yang berpusat pada masalah-masalah konkret dan mengembangkan suatu pendekatan pluralistik dalam kehidupan moral dan politis. Nama Walzer menjadi terkenal ketika ia menulis bukunya, *Just and Unjust War*, pada 1977 yang merupakan proyek untuk mencari jalan tengah antara realisme dan pasivisme dalam menilai tingkah laku pihak-pihak yang berperang dalam era modern. Ia berusaha menghidupkan kembali doktrin perang yang adil (*just war*) dari Abad Pertengahan. Karya ini telah menjadi karya klasik dalam bidang Hubungan Internasional, khususnya dalam persoalan konflik/perang antarnegara. Karya penting dalam teori politik dituliskannya pada 1983, SJ yang merupakan argumentasi bagi liberalisme yang plural dan komunal. Sesudah itu ia terus mengembangkan pendekatan pluralistik dalam kehidupan moral dan politis dalam karya-karyanya yang lain.⁹

KRITIK WALZER ATAS KLAIM UNIVERSALITAS RAWLS

Dalam Bab I SJ Walzer menyerang pengandaian yang berada di belakang suatu teori keadilan distributif yang tidak menghargai kenya-taan

⁹ Seperti: *Interpretation and Social Criticism* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987); *The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century* (London: Peter Halban, 1989); *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad* (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1994); *Politics and Passion: Toward a More Egalitarian Liberalism* (New Haven & London: Yale University Press, 2004); dan *Thinking Politically: Essays in Political Theory* (New Haven & London: Yale University Press, 2007).

pluralisme dalam masyarakat. Teori-teori semacam itu dianggapnya terlalu yakin bahwa ada “sebuah kriteria, atau sekumpulan kriteria yang saling terkait, untuk semua distribusi.”¹⁰ Bagi Walzer, Rawls adalah salah seorang filosof politik kontemporer yang mengembangkan teori semacam itu. Membela bentuk pluralistik dari prinsip-prinsip keadilan Walzer mengatakan bahwa

barang-barang kebutuhan sosial seharusnya didistribusikan dengan alasan-alasan yang berbeda-beda, menurut prosedur-prosedur yang berbeda-beda, oleh orang-orang yang berbeda-beda pula; dan bahwa segala perbedaan ini berasal dari pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda tentang barang-barang kebutuhan itu, yang merupakan hasil yang tak terelakkan dari partikularisme historis dan kultural.¹¹

Dakuan di atas adalah inti dari argumen Walzer melawan Rawls. Dakuan ini dapat dibagi dalam dua kritik yang berbeda atas apa yang disebut Walzer sebagai kesalahan abstraksi metodologis Rawls. Di satu pihak, bagian kedua dari dakuan itu menyarankan pemahamannya tentang barang-barang kebutuhan yang dikonstruksikan secara sosial, atau seperti yang dikatakan Walzer, “merupakan hasil yang tak terelakkan dari partikularisme historis dan kultural.”¹² Di lain pihak, bagian pertama dakuan itu menyarankan bahwa kita tidak dapat memisahkan metode pendistribusiannya dari makna sosial yang berbeda-beda yang terdapat dalam barang-barang tertentu. Mulhall dan Swift secara menarik menyebut bagian pertama sebagai “metodologi partikularis dari teori” (*the particularist methodology of the theory*) dan bagian kedua sebagai “substansi yang berbeda-beda” (*the differentiated substance*).¹³ Dakuan pertama mengandung ide bahwa prinsip-prinsip keadilan distributif haruslah bergantung pada budaya (*culture-specific*), sedangkan yang kedua adalah dakuan bahwa prinsip-prinsip keadilan itu juga harus bergantung pada jenis barang kebutuhannya (*good-specific*).¹⁴ Walzer berargumentasi bahwa prinsip-prinsip

10 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 4.

11 “(D)ifferent social goods ought to be distributed for different reasons, in accordance with different procedures, by different agents; and that all these differences derive from different understandings concerning the social goods themselves – the inevitable product of historical and cultural particularism.” Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 6.

12 “(T)he inevitable product of historical and cultural particularism.” Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 6.

keadilan Rawlsian gagal untuk memberikan perhatian pada kedua dakuan itu yang berakibat negatif bagi harapan untuk membangun suatu teori keadilan "prosedural secara murni" (*purely procedural*). Kegagalan ini, menurut Walzer, terjadi karena Rawls tidak mempunyai perhatian pada masalah "barang-barang kebutuhan" (*the goods*) dalam teorinya.

Berdasarkan pembagian dua dakuan di atas yang dilakukan Mulhall dan Swift, berikut ini akan diberikan ringkasan argumen Walzer melawan abstraksi metodologis Rawls dalam dua segi. Pertama, dalam bagian ini akan difokuskan pada masalah metodologi, di mana Walzer mengkritik metode abstraksi universalisme Rawls dengan suatu pendekatan partikularisme radikal. Akan dijelaskan bagaimana Walzer mengkategorikan Rawls sebagai seorang filosof politik kontemporer yang menggunakan abstraksi metodologis dan mengapa Walzer yakin bahwa ini merupakan metode yang salah untuk membangun teori keadilan. Kedua, dalam bagian berikutnya akan dibahas dakuan "substansi yang berbeda-beda," di mana Walzer merumuskan kritiknya secara lebih positif dengan mengembangkan suatu konsep keadilan yang disebutnya sebagai "kesetaraan yang kompleks."

Berlawanan dengan metode universalisme abstrak yang digunakan dalam karya Rawls, Walzer menawarkan pendekatan yang disebutnya sebagai metode partikularisme radikal. Dalam pendekatan terakhir ini para teoretikus politik diharapkan tidak mengambil jarak dari konteks masyarakat partikular tempat mereka hidup. Walzer mengusulkan agar mereka tidak menilai konteks itu dengan suatu kriteria eksternal yang diabstraksikan dari kontingensi kebudayaan itu sendiri. Dengan mengacu pada pendekatan Plato, Walzer membuat suatu perbandingan antara cara berfilsafat gaya Plato (seperti orang yang keluar dari gua, pergi keluar kota, dan mendaki gunung) dengan gayanya sendiri untuk berfilsafat (seperti orang yang tetap tinggal di dalam gua, di dalam kota, dan di dataran). Metode pertama berusaha mentransendensikan konteks yang partikular dan menemukan "suatu posisi objektif dan universal" (*an objective and*

13 Lih. Stephen Mulhall and Adam Swift, *Liberal and Communitarians*, pp. 127-128.

14 Lih. Stephen Mulhall and Adam Swift, *Liberal and Communitarians*, pp. 127-128.

universal standpoint).¹⁵ Sedangkan tujuan model kedua adalah “untuk menginterpretasikan dunia makna yang mereka hidupi kepada para warga negara yang lain.”¹⁶ Model pertama adalah metode universalisme abstrak, sedangkan yang kedua adalah pendekatan parti-kularisme radikal.

Ketika pendekatan pertama itu diterapkan pada pertanyaan tentang keadilan distributif, para filosof politik sejak dari zaman Plato, menurut Walzer, yakin bahwa “ada satu, dan hanya satu-satunya, sis-tem distribusi yang dapat ditemukan secara benar oleh filsafat.”¹⁷ Rawls, menurut Walzer, adalah salah seorang dari filosof politik kontemporer yang menerapkan pengandaian ini dalam teori keadilannya.¹⁸ Mereka semua yakin bahwa sistem keadilan distributif adalah

sesuatu yang secara ideal akan dipilih oleh laki-laki dan perempuan yang rasional, jika mereka dipaksa untuk memilih secara imparial dengan tidak mengetahui sama sekali situasi mereka sendiri, dengan dicegah untuk membuat klaim-klaim partikular, dan dihadapkan pada sekumpulan barang-barang kebutuhan yang abstrak.¹⁹

Dua prinsip keadilan Rawls, misalnya, menurut Walzer, berasal dari suatu prosedur yang diabstraksikan dari partikularitas budaya.²⁰ Abstraksi ini memungkinkan Rawls mempertimbangkan hanya pen-distribusian dari apa yang disebut sebagai barang-barang kebutuhan primer seperti “hak-hak dan kebebasan, kesempatan dan kekuasaan, pendapatan dan kesejahteraan.”²¹ Hal-hal itu adalah barang-barang kebutuhan yang diandaikan oleh Rawls diinginkan oleh semua individu.²² Dengan kata lain, barang-barang kebutuhan primer tidak tergantung dari konsepsi tentang

15 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. xiv.

16 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. xiv.

17 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 5.

18 Selain *A Theory of Justice* dari Rawls, Walzer juga menyebut karya Habermas, *Legitimation Crisis* dan karya Ackerman, *Social Justice and the Liberal State* sebagai karya-karya yang menggunakan abstraksi metodologis dalam teori keadilan mereka. Lih. Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 323, nomor 1 dari Bab 1.

19 “(T)he one that ideally rational men and women would choose if they were forced to choose impartially, knowing nothing of their own situation, barred from making particularist claims, confronting an abstract set of goods.” Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 5.

20 Prosedur yang dimaksud Walzer di sini adalah konsep “posisi asli” (*original position*) yang diandaikan Rawls dimiliki oleh pihak-pihak yang mau membuat kontrak

barang-barang kebutuhan dalam budaya tertentu. Konsekuensi lebih jauh dari abstraksi semacam ini adalah logika distribusi dalam "posisi asali" berlaku sama untuk semua barang-barang kebutuhan primer itu.

Alasan utama Walzer untuk menentang abstraksi metodologis Rawls bukanlah karena kita tidak akan mencapai satu kesimpulan yang disepakati bersama, bukan juga karena kita tidak akan menghargai kesimpulan yang "rasional" dan "imparsial" karena adanya partikula-risme kepentingan. Penolakannya lebih-lebih karena dengan pendekatan ini Rawls gagal untuk memberi perhatian serius pada "partikularisme sejarah, kebudayaan, dan keanggotaan."²³ Walzer berargumentasi bahwa pertanyaan yang paling mungkin muncul di benak para anggota suatu komunitas politis bukanlah pertanyaan tentang "Apa yang akan dipilih oleh individu-individu yang rasional dalam kondisi-kondisi yang diuniversalkan semacam ini?" seperti yang dipikirkan Rawls, melainkan "Apa yang akan dipilih oleh individu-individu seperti kita yang berada dalam situasi seperti saat ini, yang berada dalam suatu budaya tertentu dan ditakdirkan untuk melanjutkannya?"²⁴ Dengan kata lain, apa yang kurang dalam abstraksi Rawls adalah perhatian pada pertanyaan-pertanyaan ini "Pilihan-pilihan apakah yang telah kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari?" dan "Pemahaman-pemahaman apa saja yang (sungguh-sungguh) saling kita bagikan?"²⁵ Menurut Walzer, sebuah masyarakat yang adil tidak dapat dicapai tanpa acuan pada paham-paham keadilan yang sudah ada dalam sebuah masyarakat yang

sosial. Rawls memperkenalkan konsep "posisi asali" (*original position*) dalam argumen kontrak sosialnya. Ia meminta kita untuk membayangkan suatu situasi, di mana sekelompok individu berusaha mencapai kesepakatan mengenai konstitusi dasar dari masyarakat yang mau mereka bentuk, tetapi untuk menjamin sikap netral dan tidak memihak (*impartiality*) mereka, Rawls menempatkan mereka dalam "selubung ketidaktahuan" (*a veil of ignorance*). Ini adalah selubung yang membuat mereka seolah-olah tidak memiliki pengetahuan tentang ras, *gender*, kelas sosial, talenta dan kemampuan, keyakinan religius dan konsep tentang kebaikan hidup, karena pengetahuan tentang hal-hal itu membuat mereka menjadi berat sebelah untuk menentukan prinsip bersama yang akan disepakati. "Selubung ketidaktahuan" menjadi syarat dasar dari upaya untuk kembali ke "posisi asali" agar semua pihak dapat memilih prinsip-prinsip keadilan secara *fair*. Lih. John Rawls, *A Theory of Justice* (Oxford: Oxford University Press. 1971), pp. 17-22, 137-142.

21 John Rawls, *A Theory of Justice*, p. 92.

22 Lih. John Rawls, *A Theory of Justice*, pp. 92, 433.

23 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 5.

parti-kular. Abstraksi metodologis Rawls justru tidak peka terhadap paham-paham partikular tentang keadilan dalam sebuah masyarakat tertentu.

Mengapa Walzer mengkritik kurangnya perhatian Rawls pada partikularisme sejarah, kebudayaan, dan keanggotaan? Setidak-tidaknya ada dua alasan bagi Walzer untuk hal ini. Yang pertama bersifat konseptual murni, sedangkan yang kedua bersifat politis (“argumen demokratis”).²⁶ Argumen konseptual didasarkan pada teori Walzer mengenai barang-barang kebutuhan, sementara argumen demokratis adalah argumen yang berkaitan dengan usaha untuk menghindarkan pengaruh filsafat dalam ruang demokratis sebuah masyarakat tertentu.

Walzer mengawali teori tentang barang-barang kebutuhan dengan proposisi berikut ini; proposisi pertama dari enam proposisi yang disediakannya, yakni

Segala barang kebutuhan yang diatur dalam keadilan distributif adalah barang-barang kebutuhan sosial. Mereka tidaklah dan tidak mungkinlah memiliki nilai pada dirinya sendiri. ... Barang-barang kebutuhan di dunia ini memiliki makna bersama karena konsepsi dan penciptaannya merupakan proses sosial. Karena alasan yang sama, barang-barang kebutuhan itu memiliki makna yang berbeda-beda dalam masing-masing masyarakat yang berbeda.²⁷

Dalam SJ, proposisi pertama mengenai makna sosial dari barang-barang kebutuhan ini memiliki konsekuensi lain yang dirumuskan Walzer dalam lima proposisi berikutnya yang penting bagi pendekatan partikularisme radikalnya, yakni (a) bahwa identitas seorang pribadi dibentuk oleh konstruksi sosial barang-barang itu; (b) bahwa tidak ada satu kelompok barang-barang kebutuhan primer untuk “segala dunia moral dan material;” (c) bahwa makna barang-barang itu harus menentukan cara pendistribusiannya; (d) bahwa makna-makna barang-barang itu bersifat historis, maka pendistribusiannya juga “berubah dari waktu ke waktu;” dan akhirnya (e)

²⁴ Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 5.

²⁵ Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 5.

²⁶ Mulhall and Swift menyebut alasan kedua kritik Walzer terhadap Rawls ini sebagai “argumen demokratis,” karena ini adalah argumen untuk mencegah agar suatu filsafat politik tidak membuat masyarakat menjadi tidak demokratis. Lih. Stephen Mulhall and Adam Swift, *Liberal and Communitarians*, pp. 134-135.

²⁷ “All the goods with which distributive justice is concerned are social goods. They are not and they cannot be idiosyncratically valued. ... Goods in the world have shared meanings because

bahwa "pendistribusian itu harus otonom," karena makna-makna sosial barang itu juga berbeda-beda."²⁸ Keenam proposisi di atas adalah proposisi-proposisi Walzer bagi suatu teori barang-barang, di mana ia menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan seharusnya bersifat pluralistik.

Ada dua argumen melawan Rawls yang diusulkan Walzer dalam enam proposisi di atas. Yang pertama diarahkan pada abstraksi Rawls mengenai barang-barang kebutuhan primer dan yang kedua diarahkan pada penolakan atas logika distribusi kebutuhan primer itu sebagai satu-satunya logika untuk mengatur segala barang kebutuhan primer. Ketiga proposisi pertama mengungkapkan pernyataan bahwa prinsip-prinsip keadilan substantif tergantung pada makna-makna yang dimiliki oleh barang-barang kebutuhan sosial dalam masyarakat yang partikular.

Walzer menekankan bahwa makna barang-barang itu secara niscaya bersifat sosial, dalam arti bahwa barang-barang itu tidak memiliki makna "alamiah," melainkan bahwa maknanya telah dipahami dan diciptakan dalam praktik-praktik sosial sebuah masyarakat yang partikular. Para anggota masyarakat itu menciptakan barang-barang sosial itu dalam proses interaksi satu sama lain sebagai anggota dari komunitas yang sama. Konsekuensi dari konsepsi barang-barang sosial ini adalah bahwa barang-barang itu akan memiliki makna yang berbeda-beda dalam masyarakat yang berbeda.²⁹ Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat memiliki suatu kumpulan barang-barang kebutuhan primer yang dapat diterapkan melewati batas-batas kebudayaan dan bersifat universal seperti yang dibayangkan Rawls dalam prinsip-prinsip keadilan-nya. Dengan kata lain, kita tidak dapat memisahkan konsepsi tentang keadilan dari konsepsi tentang barang-barang kebutuhan sosial.

Ketiga proposisi yang terakhir berkaitan dengan relasi antara konsepsi barang-barang sosial dengan cara pendistribusiannya. Walzer yakin bahwa prinsip-prinsip distribusi itu bersifat intrinsik pada makna barang-barang kebutuhan sosial yang harus didistribusikan. Hal ini

conception and creation are social processes. For the same reason, goods have different meaning in different societies." Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 7.

28 Lih. Michael Walzer, *Spheres of Justice*, pp. 8-10.

berarti bahwa prinsip-prinsip distribusi yang berbeda diterapkan untuk barang-barang kebutuhan sosial yang berbeda pula. Seperti kita tidak dapat mentransfer konsepsi keadilan yang sama dan universal untuk setiap konteks historis dan sosial, maka kita juga tidak dapat mentransfer prinsip-prinsip distribusi yang adil suatu barang tertentu pada barang-barang sosial yang lain. Prinsip-prinsip itu hanya dapat diterapkan pada suatu barang sosial tertentu, sedangkan barang-barang sosial yang lain menuntut prinsip-prinsip distributif yang berbeda. Dengan kata lain, menurut Walzer, prinsip-prinsip distribusi bersifat internal pada keputusan-keputusan yang adil. Setiap ruang barang kebutuhan sosial memiliki logika distribusinya sendiri dan setiap masyarakat memiliki peta ruang distributif sendiri yang kompleks. Inilah yang menjadi alasan bagi Walzer untuk menyebut bukunya SJ. Ia menjelaskan proposisi ini secara lebih komprehensif dalam konsep “kesetaraan yang kompleks” yang akan dijelaskan dalam bagian ketiga artikel ini.

Apa yang mau dikatakan oleh Walzer dalam teori barang-barangnya adalah bahwa teori keadilan Rawls yang dihasilkan dari abstraksi metodologis untuk mengatur distribusi barang-barang kebutuhan primer tidak akan dapat diterapkan dan tidak akan berguna dalam dunia yang nyata, karena, seperti yang dikatakan Walzer dalam proposisi ketiga teori barang-barangnya, “tidak ada sekumpulan tunggal barang-barang kebutuhan primer atau dasar yang dapat dipahami dalam dunia moral dan material secara keseluruhan.”³⁰ Rawls telah kehilangan target keadilan distributif dengan berusaha menemukan prinsip-prinsip bagi barang-barang kebutuhan primer, karena apa yang penting dalam distribusi barang-barang sosial itu bukanlah barang-barang kebutuhan primer yang abstrak, melainkan

29 Bahkan barang-barang kebutuhan yang dianggap niscaya dalam hampir semua konteks partikular tetap memiliki makna sosial yang berbeda-beda dari kebudayaan yang satu dengan yang lain. Lih. Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 8. Walzer memberikan contoh roti, yang dijelaskannya dapat memiliki makna “primer” yang berbeda-beda tergantung dari konteksnya yang partikular (“bahan makanan untuk hidup, Tubuh Kristus, simbol Sabat, sarana untuk menunjukkan keramahan tuan rumah, dan sebagainya”). Jika kita sudah memiliki kesulitan akan makna roti sebagai suatu barang sosial, tentunya akan menjadi lebih sulit lagi memahami makna barang-barang sosial yang lebih kompleks, seperti kebebasan, kekuasaan, kekayaan, dan sebagainya.

barang-barang partikular dengan makna yang khusus dan berbeda-beda dalam masyarakat yang partikular. Walzer yakin bahwa Rawls telah gagal memberi perhatian yang serius terhadap partikularitas budaya dengan berusaha mentransendensikan konteks kultural itu dalam rangka untuk mencari suatu posisi universal dan suatu jawaban tunggal yang benar atas pertanyaan mengenai keadilan distributif. Apa yang dilawan dengan keras oleh Walzer dari Rawls adalah pretensi universalitas teori keadilan-nya yang mengakibatkan kurangnya perhatian pada pentingnya partikularitas komunitas dan kebudayaan tertentu.

Alasan kedua Walzer untuk mengkritik kurangnya perhatian Rawls pada konteks yang partikular itu terletak pada keprihatinannya bahwa kurangnya perhatian tersebut dapat meremehkan nilai pendapat warga negara biasa bila dibandingkan dengan pendapat filosof-filosof politik yang merumuskan teori keadilan. Walzer mengungkapkan keprihatinannya akan masalah ini dalam suatu artikel yang diterbitkannya sebelum SJ, yakni "Philosophy and Democracy" (1981). Pertanyaan utama yang didiskusikan dalam karya itu adalah: "Apa kedudukan filosof dalam sebuah masyarakat yang demokratis?"³¹ Jika tujuan filsafat adalah mencari kebenaran, maka ada bahaya bahwa filsafat dapat menghasilkan implikasi-implikasi yang tidak demokratis. Untuk mencari kebenaran seorang filosof mencoba menarik diri dari komunitas partikularnya agar dapat mencapai suatu posisi yang abstrak, seperti "posisi asli" dalam Rawls. Visi filsafat yang Platonis ini menyangkut suatu dakwaan akan status pengetahuan filosofis yang lebih tinggi daripada pengetahuan warga negara biasa, suatu dakwaan bahwa pemikiran sang filosof memiliki status "kebenaran" yang berada di atas pendapat warga negara biasa. Bagi Walzer, ini adalah bahaya campur tangan filsafat dalam ruang demokratis suatu komunitas politik. Teori politik semacam ini dapat membatasi jangkauan yang tersedia bagi warga negara biasa dan wakil-wakil mereka dalam demokrasi (yakni para legislator/anggota parlemen) untuk memutuskan kehidupan mereka sendiri.

Keprihatinan Walzer atas bahaya ini berdasarkan pada argumen

30 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 8.

31 Michael Walzer, "Philosophy and Democracy," *Political Theory* 9 (1981): 379.

bahwa keadilan tidak tergantung pada pengetahuan filosofis, melainkan lebih-lebih pada pengetahuan politis. Yang dimaksud dengan pengetahuan filosofis adalah pengetahuan yang berasal dari luar komunitas partikular yang merupakan usaha untuk mengartikulasikan kebenaran universal.³² Sebagai lawannya, pengetahuan politis berasal dari dalam, dari pengalaman historis yang dimiliki bersama mengenai “negosiasi, intrik, dan perjuangan” yang membentuk suatu kelompok menjadi komunitas politis.³³ Kalau pengetahuan filosofis bersifat “universal dan tunggal,” maka pengetahuan politis bersifat “partikular dan majemuk.”³⁴ Bagi Walzer, demokrasi bukanlah mengenai pengetahuan filosofis, melainkan mengenai pengetahuan politis. Untuk memasukkan pengetahuan filosofis dalam keputusan-keputusan suatu komunitas berkaitan dengan prinsip-prinsip substansial akan berarti suatu kegagalan untuk menghargai makna sosial barang-barang kebutuhan yang dimiliki bersama dan proses demokratisnya. Demokrasi harus mendahului filsafat. Apa yang penting dalam demokrasi bukanlah pengetahuan dan pendapat para filosof, melainkan pendapat para warga negaranya. Lebih jauh Walzer berargumentasi bahwa situasi ini dapat menjadi semakin buruk, ketika sang filosof berusaha membuat jalan pintas ke arena demokratis dengan berusaha membuat kesimpulan-kesimpulannya yang masuk akal dilembagakan secara langsung menjadi hukum, setelah menyadari bahwa warga negara yang lain menentang atau menghambatnya.³⁵

32 Walzer mengilustrasikan pengetahuan filosofis dengan mengacu pada usaha-usaha para filosof untuk menarik diri dari komunitas dan waktu mereka yang partikular untuk mencapai “kebenaran.” Dalam bahasanya sendiri: “*The truths he commonly seeks are universal and eternal, and it is unlikely that they can be found from the inside of any real and historic community. Hence the philosopher’s withdrawal: he must deny himself the assurances of the commonplace. ... To what sort of a place, then, does he withdraw? Most often, today, he constructs for himself ... an ideal commonwealth, inhabited by beings who have none of the particular characteristics and none of the opinions or commitments of his former fellow-citizens. He imagines a perfect meeting in and “original position” or “ideal speech situation” where the men and women in attendance are liberated from their own ideologies or subjected to universalizing rules of discourse.*” (Michel Walzer, “Philosophy and Democracy,” pp. 388-389). Jelas sekali bahwa Rawls and Habermas adalah dua tokoh yang menjadi sasaran Walzer ketika ia berusaha mengilustrasikan makna pengetahuan filosofis itu.

33 Michael Walzer, “Philosophy and Democracy,” p. 395.

34 Michael Walzer, “Philosophy and Democracy,” p. 393.

Secara singkat, argumen kedua melawan kurangnya perhatian Rawls pada konteks partikular ini merupakan argumen Walzer sebagai seorang demokrat sejati. Dalam "Philosophy and Democracy" Walzer berusaha memisahkan filsafat dari demokrasi sebagai "dua bidang kegiatan manusia yang sama sekali berbeda."³⁶ Dalam bahasanya sendiri: "Demokrasi tidak memiliki klaim dalam ruang filsafat, dan para filosof tidak memiliki hak-hak khusus dalam komunitas politis. Dalam dunia opini, kebenaran sesungguhnya hanyalah salah satu opini, dan filsuf hanyalah salah seorang pembuat opini."³⁷

KONSEP WALZER MENGENAI "KESETARAAN YANG KOMPLEKS"

Dalam bagian ini akan didiskusikan bagian kedua kritik Walzer atas Rawls, di mana ia merumuskan secara lebih positif teori keadilannya sendiri, suatu teori "substansi yang berbeda-beda" (*differentiated substance*). Ini adalah unsur substantif dari argumen Walzer, di mana ia menerapkan metodologi partikularismenya untuk menganalisis masyarakat kontemporer. Ia mengembangkan dan membela apa yang disebut-nya "kesetaraan yang kompleks" (*complex equality*) sebagai lawan dari "kesetaraan yang sederhana" (*simple equality*). Dalam bagian ini akan ditunjukkan bagaimana konsepsi ini telah muncul dari analisisnya mengenai masalah dominasi dan monopoli dalam masyarakat kontemporer dan bagaimana konsep "kesetaraan yang kompleks" itu dapat menyediakan jalan keluar yang lebih unggul bagi masalah ini daripada konsep "kesetaraan yang sederhana" yang biasa digunakan dalam konsep keadilan.

³⁵ Walzer mengilustrasikan bahaya ini dengan mengacu pada doktrin *judicial review* yang terjadi di Amerika Serikat. Apa yang mencemaskan dia adalah bahwa para filosof itu berusaha mempengaruhi para hakim yang bertanggungjawab untuk menginterpretasikan Konstitusi dengan berargumentasi bahwa individu-individu harus memiliki suatu daftar hak-hak yang luas. Walzer mengatakan bahwa jika "cakupan daftar filosofis hak-hak itu melebihi larangan kembar atas diskriminasi legal dan represi politis, hal ini membuat kegiatan peradilan yang mengganggu secara radikal terhadap apa yang mungkin disebut sebagai ruang demokratis." (Michael Walzer, "Philosophy and Democracy," p. 391). Perluasan daftar hak-hak ini berarti perluasan cakupan kekuasaan kehakiman dan oleh karena itu menyempitkan ruang bagi keputusan legislatif. Inilah yang disebut Walzer sebagai campur tangan filsafat dalam ruang demokratis, dan ia berpendapat bahwa hal ini membahayakan demokrasi.

³⁶ Michael Walzer, "Philosophy and Democracy," p. 397.

³⁷ "Democracy has no claims in the philosophical realm, and philosophers have no special rights

Untuk menilai situasi masyarakat kontemporer Walzer memu-lainya dengan proposisi terakhir dari teori barang-barangnya, di mana ia berargumentasi bahwa makna barang-barang kebutuhan sosial itu unik. Hal ini menghasilkan proposisinya bahwa prinsip-prinsip distributif harus juga unik menurut makna barang-barang itu dalam setiap "ruang/bidang" (*sphere*). Dalam bahasanya sendiri, "Setiap barang sosial atau sekumpulan barang-barang sosial itu membentuk suatu ruang distributif, di mana hanya kriteria dan pengaturan tertentu yang cocok."³⁸ Ini adalah proposisi bahwa prinsip-prinsip itu harus sesuai dengan jenis barang-barangnya (*good-specific*) yang merupakan kelanjutan dari proposisi sebelumnya bahwa prinsip-prinsip itu haruslah sesuai dengan kebudayaannya (*culture-specific*).³⁹ Untuk memperjelas hal ini, Walzer memberikan ilustrasi dari Abad Pertengahan bahwa "uang adalah tidak cocok dalam bidang jabatan-jabatan gerejawi."⁴⁰ Ini adalah alasan mengapa Kristianitas Abad Pertengahan, misalnya, mengecam dosa simoni yang memperjualbelikan jabatan gerejawi. Kecaman ini mengungkapkan proposisi bahwa "makna suatu barang sosial, jabatan gerejawi, tidak boleh diperjualbelikan."⁴¹ Ini adalah contoh suatu intervensi dari ruang lain yang secara intuitif ditolak oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa pengertian "ruang-ruang keadilan" (*spheres of justice*) yang berbeda-beda merupakan sesuatu yang intuitif. Contoh yang mirip adalah keyakinan bahwa jabatan-jabatan politis itu tidak boleh diperjualbelikan.

Sayangnya, menurut Walzer, masyarakat tidak berfungsi berdasarkan prinsip otonomi masing-masing ruang keadilan itu sehingga terjadi monopoli dan dominasi. Dalam kebanyakan masyarakat suatu barang sosial yang partikular (atau sejumlah kecil barang sosial itu) memiliki prioritas di atas barang-barang lainnya. Prinsip-prinsip distributif dalam rezim semacam ini berasal dari barang sosial yang dominan tersebut.

in the political community. In the world of opinion, truth is indeed another opinion, and the philosopher is only another opinion-maker." Michael Walzer, "Philosophy and Democracy," p. 397.

38 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 10.

39 Istilah bahwa prinsip-prinsip distributif haruslah sesuai dengan jenis barangnya (*good-specific*) dan juga harus sesuai dengan kebudayaannya (*culture-specific*) bukanlah istilah yang digunakan Walzer, melainkan interpretasi Mulhall dan Swift atas teori keadilan Walzer. (Lih. Stephen Mulhall and Adam Swift, *Liberal and Communitarians*,

Segala sesuatu diarahkan untuk pemenuhan dan distribusi barang sosial tersebut. Walzer sendiri merumuskannya demikian,

... kebanyakan masyarakat diatur berdasarkan pada apa yang boleh kita sebut sebagai suatu versi sosial dari standar emas: salah satu barang atau sekumpulan barang-barang bersifat dominan dan sangat berharga dalam segala bidang distribusi. Dan bahwa barang itu atau sekumpulan barang-barang itu biasanya dimonopoli, dalam arti bahwa nilainya diangkat oleh kekuatan dan kohesi dari para pemiliknya.⁴²

Kalau diterapkan pada Rawls argumen ini menjadi argumen bahwa Rawls memprioritaskan barang kebutuhan kebebasan individual di atas segala barang sosial yang lain. Sekumpulan barang-barang primer didistribusikan melalui prinsip perbedaan menurut kriteria yang *fair* untuk mengembangkan kebebasan setiap individu. Sejauh prinsip perbedaan ini memusatkan diri pada pendapatan sebagai cara untuk mendapatkan kebebasan yang lebih besar, maka implikasinya adalah bahwa kebebasan atau pendapatan sebagai barang sosial dominan akan memungkinkan mereka yang memilikinya untuk mendominasi barang-barang sosial lain. Kekuatan untuk "membeli" kebebasan dapat menjadi kekuatan untuk "membeli" barang-barang sosial lainnya.

Yang dimaksud dengan dominasi oleh Walzer di sini adalah "suatu cara untuk menggunakan barang-barang sosial yang tidak dibatasi pada makna intrinsiknya saja."⁴³ Dengan kata lain, dominasi suatu barang timbul ketika barang tersebut memiliki suatu komando atas barang-barang lain dari ruang yang berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan monopoli oleh Walzer adalah "suatu cara untuk memiliki atau mengontrol barang-barang sosial tertentu untuk mengeksploitasi dominasi barang-barang tersebut."⁴⁴ Monopoli dicapai ketika suatu barang dikuasai oleh seorang individu atau sekelompok individu; lalu mereka mengeksploitasi dominasi barang

p. 128). Istilah ini digunakan dalam tulisan ini karena dianggap merupakan interpretasi yang tepat atas teori keadilan Walzer.

40 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 10.

41 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 9.

42 "... (M)ost societies are organized on what we might think of as a social version of the gold standard: one good or one set of goods is dominant and determinative of value in all the spheres of distribution. And that good or set of goods is commonly monopolised, its value upheld by the strength and cohesion of its owners." Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 10.

tersebut dengan “mengubah”nya ke dalam barang-barang yang lain. Oleh karena itu, barang yang dominan itu masuk ke dalam “ruang” (*sphere*) barang sosial lain yang bukan merupakan “ruang” aslinya sendiri.

Berlainan dengan Marx, Walzer tidak percaya bahwa ada sebuah barang yang mendominasi barang-barang lainnya. Walzer mengatakan: “Sejarah mengungkapkan tiadanya barang dominan yang tunggal dan tiadanya barang dominan yang alamiah, namun hanyalah berbagai macam sihir dan kelompok tukang sihir yang berebut pengaruh.”⁴⁵ Kekuatan fisik, asal-usul keturunan, jabatan religius dan politis, tanah, modal, dan pengetahuan teknik, misalnya, telah menjadi dominan pada masa dan tempat tertentu, tetapi semua dominasi semacam itu tidak stabil. Demikian juga monopoli juga bermacam-macam, namun selalu rentan pada pola yang berubah dari dominasi dan monopoli sendiri. Sekelompok orang yang mendominasi dalam periode tertentu dapat digantikan oleh kelompok yang lain. Tidak ada kelompok yang sungguh-sungguh menjadi dominan sepanjang waktu.

Walzer berpendapat bahwa bahaya dominasi dan monopoli adalah konflik sosial dan ketidakstabilan. Dominasi menghasilkan kompetisi yang sengit antar anggota masyarakat atas barang-barang dominan yang langka, sebagian karena memiliki barang itu menjadi prasyarat untuk memiliki barang-barang sosial yang lain. Kompetisi ini mengakibatkan kontrol yang monopolistik dari beberapa kelompok atas semua barang sosial. Kontrol monopolistik semacam ini hanya dapat diatasi oleh negara yang kuat. Situasi ini tidak stabil karena tergantung dari suatu kelebihan kontrol yang mengakibatkan konflik sosial.

Bagaimana kita dapat mengatasi bahaya dominasi dan mono-poli?⁴⁶ Jawaban yang umum atas masalah ini adalah dengan mengatasi masalah monopoli, yakni dengan membuat barang yang dominan itu dapat lebih mungkin dimiliki oleh semakin banyak orang. Reaksi ini disebut Walzer sebagai reaksi suatu “rezim kesetaraan yang sederhana” (*regime of simple*

43 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, pp. 10-11.

44 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 11.

45 “History reveals no single dominant good and no naturally dominant good, but only different kinds of magic and competing bands of magicians.” Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 11.

equality).⁴⁷ Pembela ide ini percaya bahwa apa yang tidak adil bukanlah dominasinya, melainkan monopolinya. Mereka mengatasi masalah konsentrasi suatu barang dominan yang tunggal di tangan sedikit orang dengan mendistribusikan kembali barang itu kepada individu-individu dan kelompok-kelompok yang lebih luas, akan tetapi mereka tidak mengatasi masalah dominasi barang itu sendiri. Menurut Walzer, cara ini nampaknya memiliki tujuan yang baik tetapi tidak efektif. Kalau kita mengakui bahwa uang adalah barang yang dominan dalam masyarakat kita, maka mematahkan monopolinya pada sekelompok kecil individu dan mendistribusikannya kembali secara merata nampaknya menjadi solusi logis bagi ketidakadilan semacam itu. Namun, menurut Walzer, cara ini hanyalah solusi yang superfisial, yang tidak menyentuh akar masalahnya. Suatu "rezim kesetaraan yang sederhana" semacam ini tidak akan berlangsung lama, karena sebagian akan menabung, sebagian lagi akan melakukan investasi dan yang lain akan membelanjakannya. Oleh karena itu, lingkaran dominasi baru akan muncul kembali. Bahkan jika kita mampu mempertahankan suatu kesetaraan sederhana atas mata uang, Walzer berpendapat ketidak-setaraan yang baru akan muncul dan menggantikannya. Mereka yang memilih untuk membelanjakan uangnya demi pendidikan akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan mereka yang tidak membelanjakan uangnya untuk itu. Mereka yang menginvestasikan uangnya untuk barang-barang yang lain melakukan hal yang sama; dan lama-kelamaan suatu barang baru akan memperoleh dominasi "alamiah" tertentu atas barang-barang yang lain.

Walzer mengusulkan suatu alternatif yang lebih baik untuk mengatasi bahaya-bahaya dominasi dan monopoli dengan memusatkan diri untuk

46 Menurut Walzer, ada tiga kemungkinan untuk mengatasi bahaya ini, yakni: "1. *The claim that the dominant good, whatever it is, should be redistributed so that it can be equally or at least more widely shared: this amounts to saying that monopoly is unjust.* 2. *The claim that the way should be opened for the autonomous distribution of all social goods: this amounts to saying that dominance is unjust.* 3. *The claim that some new good, monopolized by some new group, should replace the currently dominant good: this amounts to saying that the existing pattern of dominance and monopoly is unjust.*" (Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 13). Walzer menyatakan bahwa dia akan berkonsentrasi pada dua usulan yang pertama, "dan khususnya dengan yang kedua." Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 13.

47 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 14.

mengatasi masalah dominasi daripada monopoli. Ia menyebut usulannya ini sebagai suatu teori “kesetaraan yang kompleks” yang merupakan lawan dari “kesetaraan yang sederhana.” Sementara para penganut rezim “kesetaraan yang sederhana” percaya bahwa apa yang tidak adil adalah monopoli, Walzer berpendapat bahwa apa yang tidak adil adalah dominasi sehingga harus ditangani terlebih dahulu. “Kesetaraan yang kompleks” harus terlibat pada kritik atas dominasi barang-barang sosial apa pun.

Walzer memulai teorinya dari suatu pluralitas barang-barang sosial; artinya, tidak ada barang sosial yang dominan, karena semuanya memiliki otonomi masing-masing dalam kaitan dengan ruang mereka yang partikular. Berlawanan dengan “kesetaraan yang sederhana,” di mana barang yang dominan dapat ditukarkan menjadi barang-barang lain, “kesetaraan yang kompleks” menjaga keunikan masing-masing barang sosial itu. Barang-barang itu tidak dapat dipertukarkan dalam arti kekuatan mereka untuk mempengaruhi distribusi dalam “ruang” yang lain dibatasi. Dengan meminggirkan masalah monopoli dan memusatkan diri terlebih dahulu pada masalah dominasi, Walzer percaya bahwa sebuah masyarakat yang lebih adil itu mungkin diwujudkan, karena “dominasi barang-baranglah yang membuat dominasi atas manusia.”⁴⁸

Pluralitas barang-barang sosial melindungi monopoli kontrol atas barang-barang itu. Manusia yang satu dapat lebih unggul dalam bidang tertentu dibandingkan dengan yang lain. Karena tidak ada barang yang dominan atas yang lain, dan karena dapat dipertukarkan, barang itu dikontrol oleh “laki-laki dan perempuan” yang menguasai bidang-bidang itu. Setiap orang dapat memiliki kompetensi yang berbeda-beda menurut bidangnya. Hal ini berarti bahwa ketidaksamaan memang tidak hilang. Orang-orang yang berbakat mungkin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih terdidik, para pengusaha mungkin tetap memiliki uang yang lebih, namun ketidaksamaan yang unik dalam masing-masing bidang itu tidak menyediakan pengaruh bagi distribusi barang-barang di bidang lain yang tidak ada kaitannya. Dengan kata lain, apa yang menjadi masalah bagi Walzer bukanlah ketidaksamaan-nya sendiri,⁴⁹ namun lebih-lebih tiadanya perhatian pada keunikan prinsip-prinsip distribusi dari setiap

bidang. Yang terakhir ini adalah apa yang disebutnya sebagai "tirani." Ia berpendapat bahwa rezim kesetaraan yang kompleks "adalah lawan dari tirani,"⁵⁰ karena rezim ini melindungi terjadinya pertukaran barang-barang sosial yang terlalu mudah dan mempertahankan keunikan masing-masing barang sosial itu.

"Kesetaraan yang kompleks" ini memiliki keprihatinan untuk merawat pluralitas barang-barang sosial. Keadilan, menurut Walzer, adalah persoalan untuk melindungi bidang barang-barang sosial yang berbeda-beda dari intervensi prinsip-prinsip yang tidak intrinsik terdapat dalam makna barang-barang tersebut. Keprihatinan ini membuatnya untuk merumuskan prinsip distributif yang terbuka, dalam arti prinsip distributif yang anti-dominasi, yakni bahwa "Barang sosial x tidak boleh didistribusikan pada laki-laki dan perempuan yang memiliki barang lain y, hanya karena mereka memiliki barang y tersebut dan tanpa kaitan dengan makna x."⁵¹

Inilah prinsip distributif sebuah masyarakat egalitarian yang kompleks, di mana "barang-barang sosial yang berbeda dipegang secara monopolistik... di mana tidak ada barang tertentu yang secara umum dapat dipertukarkan."⁵² Walzer percaya bahwa teori "kesetaraan yang kompleks" ini merupakan ide yang lebih menarik daripada teori "kesetaraan yang sederhana," karena ketidaksamaan akan dibatasi dalam masing-masing ruang keadilan, dalam distribusi masing-masing barang tersebut: ketidaksamaan berkaitan dengan barang tertentu tidak dilipat-gandakan melalui dominasinya. Apalagi ketidaksamaan semacam itu tidak akan "ditambahkan ke barang-barang lain yang berbeda," karena barang-barang yang berbeda itu akan "dikuasai oleh kelompok laki-laki dan perempuan yang berbeda" sebagai suatu konsekuensi dari penghargaan terhadap otonomi masing-masing barang itu.⁵³

CATATAN KRITIS ATAS WALZER

Salah satu kritik keras terhadap teori keadilan Walzer adalah mengenai adanya unsur relativisme dalam teorinya itu. Mulhall dan Swift

49 Walzer mengatakan bahwa "monopoli itu diijinkan dalam bidang/ruang tertentu." Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 19.

50 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 19

berpendapat bahwa Walzer memang tidak diragukan lagi telah jatuh dalam relativisme. Di salah satu bagian dalam SJ Walzer berpendapat bahwa keadilan itu “bersifat relatif pada makna-makna sosialnya,” dalam arti bahwa sebuah masyarakat yang ada itu “adil jika kehidupan substantifnya diatur oleh cara tertentu – yakni dalam arti tertentu setia dengan pemahaman bersama para anggotanya.”⁵⁴ Di bagian lain Walzer memberikan contoh sebuah masyarakat dengan sistem kasta, di mana posisi seseorang berkaitan dengan kemurnian religiusnya yang ditentukan oleh kelahiran dan darahnya adalah kriteria bagi prinsip-prinsip distributif dalam masyarakat itu. Ia berpendapat bahwa keadilan itu terkait secara internal dengan makna-makna sosial sejauh makna-makna itu dihayati bersama secara sungguh-sungguh.⁵⁵ Tekanan metodologisnya pada perhatian akan partikularitas dan makna sosial adalah sumber bagi argumentasi para lawannya yang menyatakan bahwa teori Walzer menolak kemungkinan akan kritisisme sosial yang radikal dan prinsip-prinsip formal yang universal. Pada bagian ini akan didiskusikan kritik Ronald Dworkin dan Joshua Cohen atas relativisme Walzer tersebut.

Dalam tinjauannya atas SJ Dworkin berpendapat bahwa cita-cita tentang “kesetaraan yang kompleks” itu “tidak dapat dicapai, atau bahkan tidak koheren.”⁵⁶ Pertama, hal itu tidak dapat dicapai karena kenya-taannya dalam masyarakat modern yang pluralistik tidak ada pemahaman bersama terhadap barang-barang seperti yang dibayangkan Walzer. Sebaliknya, menurut Dworkin, yang ada justru ketidak-sepakatan yang tidak dapat dijembatani dalam debat mengenai apa yang dituntut keadilan. Maka usul Walzer dalam SJ untuk menemukan prinsip-prinsip distribusi yang cocok untuk barang-barang partikular berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bersama itu tidak dapat direalisasi. Dworkin berpendapat bahwa relativisme Walzer berhadapan dengan ketidak-sepakatan yang kronis dalam argumen politis hanya akan menghasilkan dua konsekuensi: pertama,

51 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 20.

52 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 17.

53 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 17.

"tidak ada solusi yang *mungkin* dianggap adil" dan kedua, "politik hanya dapat berarti suatu pergulatan yang egois."⁵⁷ Oleh karenanya, Dworkin menyimpulkan bahwa relativisme Walzer membuat teori keadilannya lemah dan tidak dapat dipertahankan.

Kedua, menurut Dworkin, ketidakselarasan teori Walzer terletak pada relativismenya, karena relativisme itu tidak menyediakan standar-standar kritis dalam teorinya yang mampu melawan konvensi-konvensi dan tradisi-tradisi sosial, tempat makna sosial barang-barang itu melekat. Ini adalah kritik atas kemampuan pendekatan partikularistik Walzer untuk menyediakan standar-standar kritis di dalam tradisi partikular sehingga teorinya bersifat konservatif. Dworkin berpendapat bahwa kita harus menemukan prinsip-prinsip yang umum dan kritis, prinsip-prinsip universal yang eksternal dengan keluar dari tradisi partikular komunitas kita. Ia menyimpulkan kritiknya terhadap relativisme Walzer dengan mengatakan: "Kita tidak dapat meninggalkan keadilan pada konvensi dan anekdot."⁵⁸

Cohen memusatkan kritiknya atas relativisme Walzer pada penalaran komunitarianismenya. Menurut Cohen ada dua masalah dalam teori keadilan Walzer: "pertama berkaitan dengan tindakan menyetujui (*consent*), kedua berkaitan dengan kritisisme."⁵⁹ Berkaitan dengan tindakan menyetujui itu, Cohen berpendapat bahwa Walzer – seperti kaum komunitarian yang lain – cenderung untuk kurang menghargai bermacam-macam alasan dan motivasi untuk konsensus dalam teorinya mengenai masyarakat yang nyata. Walzer cenderung untuk "mengidentifikasi nilai-nilai yang melekat dalam institusi-institusi dan praktik-praktik sosial dengan nilai-nilai para anggotanya;"⁶⁰ padahal, menurut Cohen, kedua hal itu tidak identik, karena keber-macam-macam motivasi dan alasan individu untuk sampai pada konsensus.

Kritik Cohen yang kedua melawan Walzer berkaitan dengan kemampuan pendekatan interpretatifnya untuk menjadi kritis terhadap tata politis yang ada. Cohen berpendapat bahwa aspek kritis dari pendekatan

54 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, pp. 312-313.

55 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, pp. 26-28.

56 Ronald Dworkin, "To Each His Own," *New York Review of Books* 30 (1983): 5.

interpretatif Walzer terletak pada kemampuan “untuk menjadi penuh perhatian pada nilai-nilai saat ini tanpa menjadi tawanan bagi praktik-praktik yang ada;”⁶¹ artinya, perbedaan antara norma-norma dan nilai-nilai yang berasal dari pemahaman bersama dengan praktik-praktik aktual dalam masyarakat menjadi titik tolak dari kritisisme. Akan tetapi, menurut Cohen, dalam tinjauan yang lebih kritis strategi ini sangat meragukan, karena dalam strategi ini seorang teoretikus mendasarkan diri pada nilai-nilai bersama komunitas untuk membentuk suatu sikap kritis. Namun dengan menggunakan metode “interpretasi nilai,” menurut Cohen, teoretikus itu masuk dalam suatu dilema yang disebutnya sebagai “dilema komunitarian yang sederhana” (*simple communitarian dilemma*).⁶² Jika nilai-nilai komunitas, di satu pihak, diidentifikasi melalui praktik-praktik sosialnya saat ini, bagaimana norma-norma dan prinsip-prinsip itu yang secara langsung berasal dari nilai-nilai tersebut dapat menyediakan kriteria untuk menilai praktik-praktik yang ada? Di lain pihak, jika nilai-nilai itu berasal dari luar praktik-praktik yang ada itu, dengan pandangan untuk menilai kesesuaian praktik-praktik itu dengan nilai-nilai tersebut, maka tidak ada bukti imanen untuk menguji kebenaran nilai-nilai itu. Dilema ini menyediakan “alasan untuk percaya bahwa pandangan komunitarian secara intrinsik bersifat konservatif.”⁶³

Cohen menyimpulkan bahwa teori keadilan Walzer itu bersifat “atau konservatif atau kosong.”⁶⁴ Dengan mengambil posisi relativistik Walzer, seperti kaum komunitarian yang lain, menyarankan bahwa keadilan adalah mengenai mengikuti nilai-nilai kita bersama. Dalam bahasa Walzer sendiri, suatu “masyarakat yang ada itu adil jika kehidupan substantifnya diatur oleh cara tertentu – yakni dalam arti tertentu setia dengan pemahaman bersama para anggotanya.”⁶⁵ Berhadapan dengan SCD, Cohen berpendapat bahwa rekomendasi ini bersifat “atau konservatif atau kosong.” Rekomendasi ini konservatif, ketika “praktik-praktik sosial mendukung suatu interpretasi nilai yang partikular dan koheren – yakni jika kita telah

57 Ronald Dworkin, “To Each His Own,” p. 5.

58 Ronald Dworkin, “To Each His Own,” p. 6.

59 Joshua Cohen, “Review of Spheres of Justice,” *Journal of Philosophy* 83 (1983): 461.

60 Joshua Cohen, “Review of Spheres of Justice,” p. 462.

memutuskan nilai-nilai itu."⁶⁶ Di lain pihak, ketika praktik-praktik sosial itu tidak mendukung interpretasi semacam itu, rekomendasi ini menjadi kosong, karena saran-sarannya menjadi bertentangan satu sama lain yang berarti tidak ada yang direkomendasikan. Karenanya, Cohen berpendapat bahwa pendekatan interpretatif Walzer yang berdasarkan pada relativisme ini tidak dapat digunakan untuk kritisisme sosial.

Baik Dworkin maupun Cohen memberi kritik atas Walzer berkaitan dengan relativismenya. Keduanya berpendapat bahwa relativisme telah mengakibatkan penolakan Walzer atas prinsip-prinsip universal yang formal dan sekaligus pendasaran komunitarianisme pemahaman sosial komunitas politiknya (yakni pendekatan interpretatif atas makna sosial). Hal-hal itu telah mengakibatkan Walzer masuk ke dalam kontroversi yang tidak dapat dipecahkan, karena teori keadilannya tidak dapat menyediakan kriteria rasional bagi kritik atas ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ada dua konsekuensi dari relativisme Walzer yang menjadi keprihatinan Dworkin dan Cohen. Pertama, mereka meragukan kemampuan pendekatan partikularistik Walzer untuk menyediakan kritisisme sosial yang memadai. Kedua, mereka melawan penolakan Walzer akan perlunya prinsip-prinsip universal yang formal. Inilah yang membuat mereka menyimpulkan bahwa relativisme Walzer ini membuat teorinya lemah dan tidak dapat dipertahankan.

PENUTUP

Seperti dikatakan oleh Mulhall dan Swift, kekuatan prinsip distributif Walzer terletak pada kemampuannya untuk mengarahkan perhatian kita pada "studi mengenai cara barang-barang yang berbeda-beda sungguh-sungguh dipahami dalam masyarakat yang berbeda-beda" dan interpretasi yang memadai atas makna-makna barang itu yang membuat kita mempunyai komitmen pada prinsip-prinsip distribusi tertentu.⁶⁷ Yang

61 Joshua Cohen, "Review of Spheres of Justice," p. 463.

62 Joshua Cohen, "Review of Spheres of Justice," p. 463. Dilema komunitarian yang sederhana ini selanjutnya disingkat SCD.

63 Joshua Cohen, "Review of Spheres of Justice," p. 464.

64 Joshua Cohen, "Review of Spheres of Justice," p. 466.

pertama berkaitan dengan pentingnya men-jamin prinsip-prinsip distribusi itu sesuai dengan kebudayaannya (*culture-specific*), sementara yang terakhir merupakan persyaratan agar prinsip-prinsip itu juga sesuai dengan makna barang-barangnya (*good-specific*). Kalau dibandingkan dengan kedua prinsip keadilan Rawlsian, keunggulan konsep keadilan Walzer yang dirumuskannya dalam “kesetaraan yang kompleks” terletak pada rumusan prinsip-prinsip distribusi yang lebih sensitif terhadap konteks yang partikular. Prinsip distribusi yang anti-dominasi tampaknya merupakan prinsip keadilan yang lebih menarik daripada prinsip keadilan Rawlsian.

Namun kritik Dworkin dan Cohen yang mengatakan bahwa teori keadilan Walzer telah jatuh dalam relativisme merupakan kritik yang serius dan mematikan. Menurut mereka relativisme tersebut telah menghasilkan dua akibat, yakni bahwa pendekatan partikularisme radikal Walzer tidak mampu menghasilkan kritik sosial yang radikal dan bahwa Walzer menolak prinsip-prinsip universal yang formal. Bagaimana Walzer menanggapi kritik mereka yang fundamental itu? Tulisan ini tidak akan membahas secara rinci tanggapan Walzer atas kritik mereka itu, karena akan dibutuhkan satu artikel tersendiri untuk membahasnya secara lengkap. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Walzer dalam karya-karyanya setelah SJ secara serius menanggapi kritik-kritik tersebut, terutama dalam *Interpretation and Social Criticism* (1987), *The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century* (1988), dan *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad* (1994). Dalam karya-karya tersebut Walzer berargumentasi bahwa teori keadilannya tidak jatuh dalam relativisme. Ia menunjukkan bahwa dua akibat relativisme yang dikatakan oleh kritik Dworkin dan Cohen itu tidak terjadi dalam teorinya. Berikut ini akan dibahas secara singkat kedua argumentasi Walzer menanggapi kritik mereka itu.

Pertama, menanggapi keraguan akan kemampuan pendekatan partikularisme radikalnya untuk menghasilkan suatu kritik sosial yang radikal, Walzer menyatakan bahwa pendekatan partikularisme radi-kaln-

65 Michael Walzer, *Spheres of Justice*, p. 313.

66 Joshua Cohen, “Review of *Spheres of Justice*,” p. 466.

ya tidak dengan sendirinya berarti bahwa ia menolak kemungkinan akan kritik sosial yang radikal. Ia menyatakan bahwa kritik sosial yang radikal mungkin dilakukan dalam pendekatan partikularisme radikal-nya. Oleh karena itu, pendekatannya bukanlah pendekatan konservatif. Malahan ia mengatakan bahwa kritik sosial radikal yang didasarkan pada prinsip-prinsip universal eksternal dapat menjadi tidak produktif, karena masyarakat tertentu menolak intervensi dari luar.⁶⁸

Kedua, melawan kritik bahwa ia menolak prinsip-prinsip universal yang eksternal, Walzer menyatakan bahwa partikularisme moral-teoretis tetap terbuka pada norma-norma dan standar-standar universal; maka ia mengembangkan apa yang disebut Rainer Forst sebagai suatu teori "universalisme kontekstual."⁶⁹ Dalam hal ini Walzer menolak kritik bahwa teorinya membuat kontradiksi antara universalisme dan partikularisme, lalu menolak prinsip-prinsip universal. Walzer berargu-mentasi bahwa ia mengembangkan suatu teori universal yang tidak bertentangan dengan partikularisme, melainkan yang memiliki suatu relasi yang mendukung dan menambah partikularisme.

Demikianlah secara singkat mau ditunjukkan bahwa Walzer secara serius menanggapi kritik-kritik tersebut dalam karya-karyanya setelah SJ untuk membela dirinya tidak jatuh dalam relativisme.

DAFTAR RUJUKAN

- Avineri, Shlomo and Avner de-Shalit, eds. *Communitarianism and Individualism*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Cohen, Joshua. "Review of Spheres of Justice." *Journal of Philosophy* 83 (1986): 457-468.
- Dworkin, Ronald. "To Each His Own." *New York Review of Books* 30 (1983): 4-6.
- Gill, Emily R. "Walzer's Complex Equality: Constraints and the Right to be Wrong." *Polity* 20 (1987): 32-56.
- Forst, Rainer. *Contexts of Justice: Political Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2002.

⁶⁷ Stephen Mulhall and Adam Swift, *Liberal and Communitarians*, p. 150.

- Haus, Michael. *Die politische Philosophie Michael Walzers*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2000.
- Kymlicka, Will. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Lukes, Steven. *Liberals and Canibals: The Implications of Diversity*. London: Verso, 2003.
- MacIntyre, Alasdair. *After Virtue*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981.
- _____. *Whose Justice? Which Rationality?* London: Duckworth, 1988.
- _____. *Three Rival Versions of Moral Enquiry*. London: Duckworth, 1990.
- Miller, David. *Principles of Social Justice*. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1999.
- Miller, David and Michael Walzer, eds. *Pluralism, Justice and Equality*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Mulhall, Stephen and Adam Swift. *Liberal and Communitarians*. Second Edition. Oxford: Blackwell, 1992.
- O'Neill, Shane. *Impartiality in Context: Grounding Justice in a Pluralist World*.

68 Argumentasi Walzer untuk membela posisinya bahwa kritik sosial radikal dimungkinkan dalam pendekatan partikularisme radikal ini dikemukakannya dalam ketiga buku di atas. Dalam *Interpretation and Social Criticism* ia melawan kritik konservatisme dengan memberikan suatu argumen teoritis-moral tentang kemungkinan kritik sosial yang imanen dalam pendekatan interpretatif. Pada intinya, ia melukiskan bagaimana pendekatan interpretatif "paling sesuai dengan pengalaman sehari-hari kita berkaitan dengan moralitas" (Michael Walzer, *Interpretation and Social Criticism*, p. 1) dan menyediakan kemungkinan kritik sosial internal yang radikal tanpa standar-standar eksternal. Dalam buku kedua, *The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century*, ia memberikan suatu analisis politis-historis atas praktik-praktik sosial yang konkret pada abad kedua puluh dengan memberikan contoh-contoh dari tokoh-tokoh kritis dalam masyarakat (misalnya Julian Benda, Martin Buber, Antonio Gramsci, George Orwell). Dari analisis ini Walzer mau mengatakan bahwa kritik radikal yang internal mungkin dilakukan seperti yang telah dilaksanakan oleh para tokoh tersebut. Dalam buku ketiga, *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*, Walzer memberikan beberapa argumen tambahan atas kritik sosial, yakni bahwa kritik internal dapat memungkinkan terjadinya transformasi yang fundamental dalam masyarakat. Misalnya, kritik atas komunisme oleh para pembangkang di Eropa Timur mengakibatkan runtuhnya ideologi komunisme dan digantikan dengan ideologi yang baru. Lih. Michael Walzer, *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad* (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1994), pp. 41-61.

69 Rainer Forst, *Contexts of Justice: Political Philosophy beyond Liberalism and Communitarianism* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2002), p. 167. Dalam hal ini Forst membela Walzer yang dianggapnya menghilangkan oposisi antara universalisme dan kontekstualisme. Kontekstual dalam "universalisme

- Albany, New York: State University of New York Press, 1997.
- Orend, Brian. *Michael Walzer on War and Justice*. Cardiff: University of Wales Press, 2000.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.
- _____. *A Theory of Justice*. Oxford: Oxford University Press, 1971.
- Taylor, Charles. *Philosophical Papers*. Volumes 1 & 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- _____. *Sources of the Self*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Walzer, Michael. "The Communitarian Critique of Liberalism." *Political Theory* 18 (1990): 6-23.
- _____. *The Company of Critics: Social Criticism and Political Commitment in the Twentieth Century*. London: Peter Halban, 1989.
- _____. *Interpretation and Social Criticism*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.
- _____. "Liberalism and the Art of Separation." *Political Theory* 12 (1984): 315-330.
- _____. "Philosophy and Democracy." *Political Theory* 9 (1981): 379-399.
- _____. *Politics and Passion: Toward a More Egalitarian Liberalism*. New Haven & London: Yale University Press, 2004.
- _____. *Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality*. New York: Basic Books, 1983.
- _____. *Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1994.

kontekstual" di sini berarti sensitif terhadap konteks, dalam arti "bentuk universalisme ini menghargai keterbatasan konteks sosial, namun tidak menganggapnya sebagai keterbatasan moralitas pada umumnya." Rainer Forst, *Context of Justice*, pp. 167-168.

